

**TAHUN
2025**



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN TAHUN 2025

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA BANDA ACEH
NOMOR 664 TAHUN 2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM ASESOR RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna peningkatan kualitas pengendalian internal di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, perlu dilakukan Evaluasi atas Rencana Tindak Pengendalian;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Asesmen atas Rencana Tindak Pengendalian, dipandang perlu membentuk Tim Asesor atas Rencana Tindak Pengendalian di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota -kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;


9. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Membentuk Tim Asesor atas Rencana Tindak Pengendalian (RTP) di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Asesor atas Rencana Tindak Pengendalian (RTP) di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh bertugas mengasesmen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBK Kota Banda Aceh melalui DPA-SKPD Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 23 Desember 2024 M
21 Jumadil Akhir 1446 H

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA BANDA ACEH**


ALIMSYAH, S.Pd., MS
Pembina Utama Muda
NIP. 19720929199903 1 007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA
BANDA ACEH
NOMOR : 664 TAHUN 2024
TANGGAL : 23 DESEMBER 2024 M
21 Jumadil Akhir 1446 H

**SUSUNAN PERSONALIA TIM ASESOR RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
(RTP) DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPN KOTA BANDA ACEH**

KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN / NAMA
Pengarah/Penanggunng Jawab	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh
Ketua	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh
Sekretaris	Kabid. Kearsipan
Anggota	Kabid. Perpustakaan
Anggota	Fungsional / Perencana Ahli Muda
Anggota	Pustakawan Ahli Muda
Anggota	Arsiparis Ahli Muda
Anggota	Arsiparis Ahli Pertama
Anggota	Kasubbag Umum Kepegawaian dan Aset
Anggota	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KOTA BANDA ACEH**


ALIMSYAH, S.Pd., MS
Pembina Utama Muda
NIP. 19720929199903 1 007

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kota Banda Aceh Tahun 2025 dapat tersusun dengan baik. Dokumen ini disusun berdasarkan amanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan uraian tentang upaya pemerintah untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran dengan menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan risiko, yang meliputi upaya penguatan lingkungan pengendalian dan struktur, kebijakan dan prosedur organisasi untuk mengendalikan risiko.

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian mengacu kepada lima unsur pengendalian intern, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. Informasi untuk mempersiapkan rencana tindak pengendalian intern diperoleh dari hasil evaluasi, penilaian, atau pemetaan atas sistem pengendalian intern yang ada, dengan memperhatikan struktur dan praktik tata kelola organisasi.

Diperlukan komitmen dari semua pihak yang terkait untuk melaksanakan rekomendasi yang muncul dalam Laporan Rencana Tindak Pengendalian Dispersip Kota Banda Aceh. Kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penyusunan Rencana tindak Pengendalian ini, kami mengucapkan terima kasih. Kami berharap agar Rencana Tindak pengendalian ini bermanfaat dan memiliki kontribusi konkrit bagi upaya pencapaian tujuan organisasi.

Banda Aceh, Januari 2025

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Banda Aceh,



Alimsyah, S.Pd., MS

Pembina Utama Muda

Nip. 19720929 199903 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1. Latar Belakang 1

 1.2. Dasar Hukum 2

 1.3. Maksud dan Tujuan 2

 1.4. Manfaat..... 2

 1.5. Ruang Lingkup 3

BAB II PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

 2.1. Pengertian SPIP 4

 2.2. Tujuan SPIP 4

 2.3. Unsur-Unsur Dalam SPIP 5

 2.4. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini 6

BAB III PENILAAAN RESIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

 3.1. Penetapan Konteks/tujuan 8

 3.2. Hasil Identifikasi Resiko 9

 3.3. Hasil Analisis risiko..... 9

 3.4. Pengendalian yang masih dibutuhkan 11

 3.5. Rancangan Informasi dan Komunikasi 11

 3.6. Pemantauan dan Evaluasi..... 12

BAB IV PENUTUP 14

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya paket Reformasi Birokrasi di bidang keuangan negara dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara serta untuk menciptakan *Good Governance* melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan negara yang bebas KKN, maka diperlukan Sistem Pengendalian Intern dalam mengelola keuangan negara.

Selanjutnya terkait dengan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara disebutkan dalam Pasal 12 bahwa dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP.

Sebagai instansi penyelenggara pemerintahan, Pemerintah Kota Banda Aceh wajib menyelenggarakan kebijakan SPIP sesuai PP SPIP dan Peraturan Walikota tersebut secara terintegrasi ke dalam kegiatan dan tindakan pelaksanaan tugas pokok di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Rencana Tindak Pengendalian SPIP ditetapkan sebagai wujud pelaksanaan SPIP secara menyeluruh dalam penyelenggaraan tugas pokok Pemerintahan Kota Banda Aceh. Rencana Tindak Pengendalian merupakan uraian mengenai rencana tindak (*action plan*) penguatan SPIP baik dalam bentuk pembangunan lingkungan pengendalian maupun infrastruktur kebijakan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok

Pemerintah Kota Banda Aceh sehingga diharapkan dapat mendukung atas pencapaian tujuan, misi dan visi Pemerintah Kota Banda Aceh.

1.2. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
3. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
4. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh;
5. Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Resiko pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya.

Adapun maksud penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ditujukan sebagai rencana tindak (*action plan*) penguatan SPIP baik dalam bentuk pembangunan lingkungan pengendalian maupun infrastruktur kebijakan pengendalian yang akan dilaksanakan oleh pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dispersip Kota Banda Aceh.

1.4. Manfaat

Manfaat RTP bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh Tahun 2024 adalah :

1. Memberikan arah dalam pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh;
2. Menjadi dasar dalam membangun infrastruktur pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP;

3. Menjadi dokumentasi dalam penyelenggaraab SPIP dan Pengukuran kemajuan penyelelenggaraan SPIP;
4. Pengelolaan aset dan keuangan dapat diselenggaraan secara handaldan minim risiko.

1.5. Ruang Lingkup

Rencana Tindak Pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan masuk didalm dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dispersip Kota Banda Aceh yang akan mendukung ketercapaian rencana Perangkat Daerah (RPD) Pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2023-2026. Pelaksanaan RTP ini melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkatan manajemen, pegawai, dan unit kerja dilingkungan Dispersip Kota Banda Aceh dan realisasi atas RTP ini diharapkan dapat dilakukan secara menyuluruh pada tahun 2025.

BAB II

PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

2.1. Pengertian SPIP

Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah sistem pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sistem Pengendalian Intern dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 dilandasi pada pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus (*never ending process*) oleh pimpinan dan seluruh pegawai.

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kota Banda Aceh sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi.

Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan aset negara/daerah yang diamanatkan kepada Dispersip Kota Banda Aceh, menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

2.2. Tujuan SPIP

Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal 3 disebutkan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan

Walikota/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP.

SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.3. Unsur-Unsur Dalam SPIP

Seperti telah disebutkan pada Ruang Lingkup bahwa suatu pengendalian intern dipengaruhi oleh berbagai faktor atau unsur. Hal tersebut dalam SPIP diakomodir sehingga menjadi bagian atau unsur yang membentuk SPIP, yaitu :

1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- penegakan integritas dan nilai etika;
- komitmen terhadap kompetensi;
- kepemimpinan yang kondusif;
- pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
- hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2. Penilaian Risiko

Pimpinan instansi wajib melakukan penilaian risiko yang mencakup identifikasi risiko dan analisis risiko, baik risiko yang menghambat pencapaian tujuan instansi maupun risiko yang menghambat pelaksanaan kegiatan.

3. Kegiatan Pengendalian

Pimpinan instansi wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian atau pengendalaian intern sekurang-kurangnya terhadap kegiatan pokok/tupoksi dan kewenangan instansi. Pengendalian intern harus

terkait dengan proses penilaian risiko dan dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa pengendalian intern tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

4. Informasi dan Komunikasi

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Informasi dan komunikasi bukan hanya dalam lingkup internal, namun juga dengan para stakeholders.

5. Pemantauan

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan berupa tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya oleh pihak eksternal.

2.4. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Penyelenggaraan SPIP Dispersip Kota Banda Aceh dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dapat dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut Dispersip Kota Banda Aceh menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun 2025 yang berisikan prioritasi Tujuan, Sasaran Strategis, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang akan dinilai kemungkinan terjadinya resiko.

Beberapa langkah strategis yang ditempuh untuk menghasilkan RTP ini, antara lain :

1. Rekapitulasi Evaluasi Lingkungan Pengendalian seluruh Lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh telah melaksanakan survei persepsi melalui pengisian kuestioner Control Environment Evaluation (CEE) oleh pejabat struktural yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang yang terdapat di Dispersip Kota Banda Aceh. Kuestioner *Control Environment Evaluation* (CEE) berisikan 8 (delapan) kategori pertanyaan lingkungan pengendalian intern yang kemudian dilakukan pemberian penilaian (skoring). Untuk Lebih jelasnya dapat dilihat pada Form 1.a CEE.

2. Melakukan Penilaian (skoring) berdasarkan jawaban Responden (R).
Penilaian (skoring) dilakukan berdasarkan jawaban yang diberikan atas pertanyaan pada sub unsur lingkungan pengendalian skala penilaian. Skala penilaian ini dapat dilihat pada *Tabel 2.1*.

Tabel 2.1
Skoring Penilaian Terhadap Lingkungan Pengendalian

No	Skor	Keterangan Jawaban	Kesimpulan Jawaban
1.	1	Tidak Setuju/Belum ada/belum dibangun	Tidak Memadai
2.	2	Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten	Kurang Memadai
3.	3	Setuju/sudah dibangun atau diterapkan dengan baik tapi masih bisa ditingkatkan	Cukup Memadai
4.	4	Sangat Setuju/Sudah dibangun atau ditetapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain.	Memadai

3. Merumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh untuk menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efektif dan efisien dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian lingkungan Dispersip Kota Banda Aceh, diperoleh gambaran yang tertuang pada *Tabel 2.2*.

Tabel 2.2
Penilaian Terhadap Lingkungan Pengendalian

No	Lingkungan Pengendalian	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	memadai
4	Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	memadai
6	Kebijakan Pengembangan SDM	memadai
7	Pengawasan Internal yang Efektif	memadai
8	Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah	memadai

BAB III

PENILAIAN RESIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

3.1. Penetapan Konteks/Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh melalui Rencana Tindak Pengendalian dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penetapan Konteks Resiko Strategis Pemerintah Kota Banda Aceh.

Pada Tahun 2025 Dispersip Kota menetapkan prioritas untuk konteks resiko yang didasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Banda Aceh, Dispersip Kota Banda Aceh menetapkan Tujuan Strategis, Sasaran Startegis, Indikator Strategis yang mendukung Pemerintah Kota Banda Aceh beserta resiko yang akan muncul. Untuk lebih jelasnya mengenai Penetapan Konteks Resiko Strategis dapat dilihat pada Lampiran 5 Form 2.a, Lampiran 5 Form 2.b, Lampiran 5 Form 2.c dan Lampiran 5 Form 3.a.

2. Penetapan Konteks Resiko Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh.

Berdasarkan penetapan konteks resiko strategis Pemerintah Kota Banda Aceh, Dispersip Kota Banda Aceh menerapkan tujuan, sasaran dan IKU yang didasarkan pada Renstra periode 2023-2026 yang akan dilakukan penilaian resiko strategis dan berdasarkan hasil penilaian atas resiko strategis Dispersip Kota Banda Aceh, terdapat resiko yang menjadi prioritas untuk ditangani. Untuk lebih jelasnya mengenai penetapan konteks resiko strategis Dispersip Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Lampiran 5 Form 3.b.

3. Penetapan konteks Resiko operasional Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh.

Berdasarkan penetapan konteks resiko strategis Dispersip Kota Banda Aceh, maka ditetapkan konteks resiko operasional yang didasarkan Rencana Kerja (Renja) Dispersip Kota Banda Aceh yang berdasarkan hasil penilaian resiko strategis Dispersip Kota Banda Aceh, terdapat resiko Operasional yang menjadi prioritas untuk ditangani. Untuk lebih jelasnya mengenai penetapan konteks resiko Operasional Dispersip Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Lampiran 5 Form 3.c.

3.2. Hasil Identifikasi Risiko

Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan atas resiko yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh, terdapat resiko-resiko yang menjadi prioritas untuk ditangani oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh.

Risiko Pencapaian Sasaran 1 pada Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh :

- Meningkatkan Layanan Perpustakaan.

Risiko Pencapaian Sasaran 2 pada Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh :

- Terwujudnya Penyelenggaraan kearsipan sesuai standar.

Selain risiko dalam pencapaian sasaran strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh, terdapat risiko operasional yang dapat menghambat pencapaian tujuan kegiatan utama organisasi yaitu :

1. Kurangnya tenaga SDM di dalam proses verifikasi dan respon pengunjung terkait pengembangan pojok baca digital / perpustakaan Elektronik;
2. Terbatas dukungan anggaran untuk melaksanakan sub kegiatan;
3. Minimnya Update koleksi buku perpustakaan;
4. Belum adanya Rekord Center disetiap OPD sehingga tidak menjamin keselamatan dan keamana Arsip; dan
5. Belum Adanya Perangkat Pendukung untuk menunjang layanan kearsipan.

3.3. Hasil Analisis Risiko

Penetapan hasil analisis resiko pada Dispersip Kota Banda Aceh tersebut mengacu pada dua parameter, yaitu besarnya dampak dan kemungkinan frekuensi terjadinya resiko. Parameter pertama, yaitu besarnya dampak/konsekuensi dan Parameter yang kedua, yaitu kemungkinan frekuensi terjadinya resiko. Level Resiko kemungkinan pada Dispersip Kota Banda Aceh dapat dilihat pada *Tabel 3.1* dan Lampiran 5 Form 4.

Tabel 3.1
Level Risiko Kemungkinan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Skala	Level Resiko	Dampak
1	Rendah Sekali	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan urusan tidak signifikan .
2	Rendah	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan urusan rendah/kurang signifikan .
3	Tinggi	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan urusan tinggi/signifikan .
4	Tinggi Sekali	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan urusan sangat signifikan .

Analisis risiko dilakukan dengan *Focused Group Discussion* (FGD) kepada responden yang mewakili unsur pimpinan dan pegawai Dispersip Kota Banda Aceh. Hasil analisis atas risiko-risiko tersebut memperlihatkan peta risiko seperti pada *Tabel 3.2* sebagai berikut :

Tabel 3.2
Level Risiko Dampak/Konsekuensi pada
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh

Matriks Analisis Risiko			Dampak/Konsekuensi			
			Rendah Sekali	Rendah	Tinggi	Tinggi Sekali
			1	2	3	4
Kemungkinan Terjadinya Risiko	Sangat Sering	4				
	Sering	3		ROO.25.24.25.16		
	Jarang	2		ROO.25.23.25.08	ROO.25.23.25.04 ROO.25.23.25.12	
	Sangat jarang	1				
Keterangan :			Sangat Rendah	Rendah	Tinggi	Sangat Tinggi

Berdasarkan peta risiko di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat 1 risiko yang mempunyai level sering yang berarti kemungkinan untuk terjadinya risiko tersebut sering dan dampak yang ditimbulkan rendah, yaitu risiko :

- a. Termusnahkannya alat bukti yang seharusnya tidak boleh dimusnahkan dan tidak ada penggantinya (ROO.25.24.25.16)
- 2. Terdapat 1 risiko yang mempunyai level jarang yang berarti kemungkinan untuk terjadinya risiko tersebut jarang dan dampak yang ditimbulkan rendah, yaitu risiko :
 - a. Terhentinya layanan Informasi Perpustakaan (ROO.25.23.25.08)
- 3. Terdapat 2 risiko yang mempunyai level jarang yang berarti kemungkinan untuk terjadinya risiko tersebut jarang dan dampak yang ditimbulkan tinggi, yaitu risiko :
 - a. Minimnya Update koleksi judul buku yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka(ROO.25.23.25.04)
 - b. Kurangnya tenaga SDM di dalam proses Sosialisasi (ROO.25.23.25.12)

3.4. Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan

Dalam rangka meningkatkan efektifitas penanganan risiko, beberapa kegiatan pengendalian yang telah ada perlu ditingkatkan dan beberapa kegiatan pengendalian baru perlu dibangun. Perncaanaan Kegiatan pengendalian didasarkan kepada upaya untuk mengurangi dampak apabila risiko benar-benar terjadi. Kegiatan pengendalian yang sudah ada dan masih dibutuhkan dapat dilihat pada *tabel 3.3.* dan Lampiran 5 form 7.

Tabel 3.3
Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

No.	Pernyataan Resiko	Pengendalian yang Sudah Ada	Pengendalian yang dibutuhkan
1.	Meningkatnya Penggunaan Gadget di Kalangan Pelajar Tingkat SD dan SMP	Melaksanakan sosialisasi minat dan budaya baca pada kalangan pelajar, melibatkan peran orang tua terhadap dampak dari penggunaan Gadget	Meningkatkan dan melahirkan bentuk sosialisasi secara langsung dan menyeluruh dengan menggunakan fasilitas Teknologi Informasi
2.	Belum berjalannya penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan aturan	Usulan Regulasi terkait Kearsipan	Menyusun draft regulasi kearsipan

3.5. Rancangan Informasi Dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung

berjalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP. Terkait dengan pengkomunikasian atas kegiatan pengendalian yang dibangun dapat dilihat pada lampiran 5 form 8.

3.6. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi :

1. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh membangun dan melaksanakan pemantauan berkelanjutan, meliputi evaluasi, supervisi dan reviu. Pemantauan berkelanjutan atas pengendalian tertuang dan terintegrasi dalam kebijakan dan prosedur pengendalian.

Pemantauan berkelanjutan yang akan dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh dapat dilihat pada lampiran 5 form 9.

2. Evaluasi Terpisah

Inspektorat Kota Banda Aceh melaksanakan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP pada unit-unit kerja strategis pada akhir tahun. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif.

3. Pelaksanaan Tindak lanjut

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/reviu dari auditor eksternal maupun internal, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh melaksanakan tindak lanjutnya.

4. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Memberikan laporan atas pelaksanaan RTP sesuai tanggungjawabnya secara berkala kepada tim pemantau. Hasil pemantauan tim pemantau dilaporkan kepada Walikota Banda Aceh.

Demikianlah dokumen Rencana Tindak Pengendalian dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh dalam rangka pencapaian tujuan organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh.

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ini merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai upaya mewujudkan proses terpadu yang dilaksanakan oleh pimpinan dan seluruh pegawai secara terus menerus dan berkesinambungan. Dengan penyelenggaraan SPIP diharapkan dapat memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien.

Dokumen RTP ini juga menjadi instrumen untuk merencanakan dan mengendalikan pencapaian kinerja sebagaimana target yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh.

Komitmen dari segenap jajaran pimpinan dan seluruh pegawai serta ditunjang manajerial yang profesional, efektif, efisien, transparan, serta akuntabel dan berbasiskan pada fungsi, diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPIP pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh akan tercapai secara bertahap dan berkelanjutan.

Dokumen RTP ini berlaku efektif sejak ditandatangani. Dalam hal ini terjadi perubahan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, maupun terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN
CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Tahun Penilaian : 2025

NO.	PERTANYAAN/KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)						SIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	
A	B	C						D
A.	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA							MEMADAI
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll)	3	4	3	4	3	3	MEMADAI
2	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	3	4	3	4	3	4	MEMADAI
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	3	4	3	3	3	3	MEMADAI
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku	3	3	3	4	3	3	MEMADAI
B	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI							MEMADAI
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	3	4	4	4	3	3	MEMADAI

NO.	PERTANYAAN/KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN KUOSIONER CEE	
		C								D
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus		
A	B									
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	3	3	3	3	3	3	3	MEMADAI	
3	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	3	4	3	4	3	3	3	MEMADAI	
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	3	3	3	3	3	3	3	MEMADAI	
C	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF								MEMADAI	
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	4	4	3	4	3	3	4	MEMADAI	
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	4	4	3	4	3	3	4	MEMADAI	
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggal pelaporan risiko/masalah	3	4	3	4	3	3	3	MEMADAI	
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	4	4	3	3	3	4	4	MEMADAI	
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda	4	4	3	4	3	4	4	MEMADAI	
6	Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat operasioanl OPD (<i>cascading</i>)	4	4	3	4	3	3	4	MEMADAI	

NO.	PERTANYAAN/KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)						SIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	
A	B	C						D
7	Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko	3	4	3	4	3	3	MEMADAI
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	3	3	3	4	3	4	MEMADAI
D	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN							MEMADAI
1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat	4	4	4	4	3	3	MEMADAI
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	4	4	3	4	3	3	MEMADAI
3	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat <i>ad hoc</i> (sementara)	4	3	3	4	3	4	MEMADAI
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	4	3	3	4	3	4	MEMADAI
E	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT							MEMADAI
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	4	4	3	4	3	3	MEMADAI
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	4	4	3	4	3	4	MEMADAI
3	Kewenangan direviu secara periodik	4	4	3	4	3	3	MEMADAI

NO.	PERTANYAAN/KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	
A	B	C							D
F	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA	MEMADAI							MEMADAI
1	Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	3	3	3	4	3	3	3	MEMADAI
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	3	3	3	3	3	3	3	MEMADAI
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	4	3	3	4	3	3	3	MEMADAI
4	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko	4	3	3	4	3	3	3	MEMADAI
5	Adanya pemberian <i>reward</i> dan/atau <i>punishment</i> atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	3	3	3	4	3	3	3	MEMADAI
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	4	3	3	4	3	3	3	MEMADAI
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	4	3	3	3	3	3	3	MEMADAI
G	PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF	MEMADAI							MEMADAI
1	Inspektorat Daerah melakukan reuiu atas efisiensi/ efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	4	4	3	4	3	3	4	MEMADAI
2	Inspektorat Daerah melakukan reuiu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	4	4	3	4	3	3	4	MEMADAI

NO.	PERTANYAAN/KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	
A	B	C							D
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	4	4	3	4	3	3	4	MEMADAI
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko.	4	4	3	4	3	3	4	MEMADAI
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	4	3	3	4	3	3	3	MEMADAI
H	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT								MEMADAI
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	4	4	4	4	3	3	4	MEMADAI
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/peemriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	4	4	4	4	3	3	4	MEMADAI

Banda Aceh, 02 Januari 2025
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kota Banda Aceh



Alimsyah, S.Pd., MS
Pembina Utama Muda
Nip. 19720929 199903 1 007

KONDISI KERENTANAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

Nama Pemda : Kota Banda Aceh
Tahun Penilaian : 2025

No.	Sumber data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
A	B	C	D
1	Anjab dan ABK	Penempatan tugas pegawai (ASN) tidak sesuai dengan kompetensi, kualifikasi pendidikan dan analisis jabatannya sehingga kinerja yang dihasilkan tidak maksimal	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN
2	Peraturan Walikota Banda Aceh No. 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh	Pendelegasian Kewenangan belum sesuai dengan Tupoksi	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT

Banda Aceh, 02 Januari 2025
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kota Banda Aceh


Alimsyah, S.Pd., MS
Pembina Utama Muda
Nip. 19720929 199903 1 007

Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

Nama Pemda : Kota Banda Aceh
Tahun Penilaian : 2025

No.	Sub Unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Penegakan integritas dan nilai etika	Memadai		Memadai		Memadai	
2	Komitmen terhadap kompetensi	Memadai		Memadai		Memadai	
3	Kepemimpinan yang kondusif	Memadai		Memadai		Memadai	
4	Struktur organisasi sesuai kebutuhan	Memadai		Memadai		Memadai	
5	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat	Memadai		Memadai		Memadai	
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Memadai		Memadai		Memadai	
7	Perwujudan peran APIP yang efektif	Memadai		Memadai		Memadai	
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai		Memadai		Memadai	

Banda Aceh, 02 Januari 2025
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kota Banda Aceh


Alimsyah, S.Pd., MS
Pembina Utama Muda
Nip. 19720929 199903 1 007

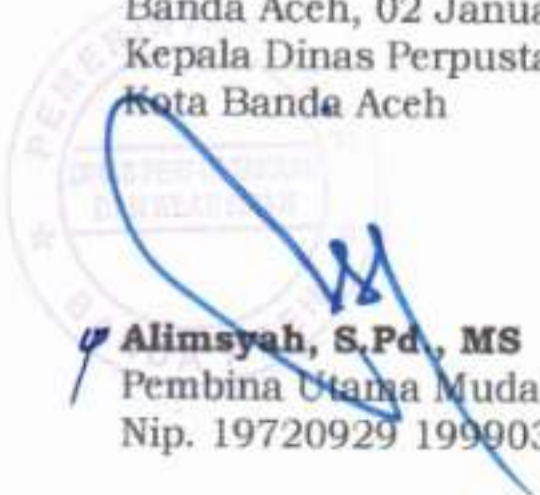
PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Banda Aceh
Tahun Penilaian	:	2025
Periode yang dinilai	:	1 Januari 2025 - 31 Desember 2025
Sumber Data	:	RPD Kota Banda Aceh 2023-2026
Visi	:	-
Misi Strategis RPD	:	-
Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemda	3	Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah
Tujuan Strategis RPD	1	Mengoptimalkan Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam
	2	Meningkatkan Kualitas Demokrasi dan Ketenteraman Umum
	3	Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah
	4	Mengoptimalkan kualitas pendidikan
	5	Mengoptimalkan Kualitas Kesehatan
	6	Meningkatkan Penguatan Ekonomi dan Sosial
	7	Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisata
	8	Mengoptimalkan Upaya Pelestarian Budaya
	9	Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur dan Penataan Kawasan Permukiman
	10	Mengoptimalkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	11	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, tata kelola RTH, dan Mitigasi Bencana
	12	Mengoptimalkan Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Olahraga
	13	Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Daerah
Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda	3	Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah
Sasaran RPD	1.1	Optimalnya Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam
	2.1	Meningkatnya Kualitas Demokrasi dan Ketenteraman Umum
	3.1	Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah
	4.1	Optimalnya Kualitas Pendidikan
	5.1	Optimalnya Kualitas Kesehatan
	6.1	Meningkatnya Penguatan Ekonomi dan Sosia
	7.1	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata

	8.1	Optimalnya Upaya Pelestarian Budaya
	9.1	Meningkatnya Pengembangan Infrastruktur dan Tertatanya Kawasan
	10.1	Optimalnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	11.1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, tata kelola RTH, dan Mitigasi Bencana
	12.1	Optimalnya Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Olahraga
	13.1	Meningkatnya Sumber Pendapatan Asli Daerah
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda	3.1	Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah
IKU Sasaran RPD	1.1	Indeks Kota Syariah (IKS)
	2.1.1	Indeks Ketenteraman Umum
	3.1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (0.00%)
	3.1.2	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
	4.1.1	Indeks Kualitas Pendidikan
	5.1.1	Indeks Kualitas Kesehatan
	6.1.1	Pertumbuhan Ekonomi
	6.1.2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
	6.1.3	Persentase Pemenuhan Layanan SPM Sosial
	7.1.1	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata
	8.1.1	Indeks Pelestarian Budaya Daerah
	9.1.1	Rata-rata Capaian Layanan Infrastruktur Dasar Perkotaan
	10.1.1	Indeks Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	11.1.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
	11.1.2	Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota
	11.1.3	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)
	12.1.1	Indeks Pemberdayaan Pemuda Dan Pembinaan Olahraga
	13.1.1	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Penetapan konteks IKU Risiko Strategis Pemda	3.1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (0.00%)
	3.1.2	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Prioritas pembangunan dan program unggulan	1	Pembinaan Perpustakaan
	2	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
	3	Pengelolaan Arsip
	4	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Urusan Pemerintahan Daerah	:	Urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar
Nama Dinas Terkait	:	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	TUJUAN	Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah
	SASARAN	Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah
	IKU	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (0.00%)
		Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
	PROGRAM	- Pembinaan Perpustakaan
		- Pengelolaan Arsip

Banda Aceh, 02 Januari 2025
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kota Banda Aceh


Alimsyah, S.Pd., MS
Pembina Utama Muda
Nip. 19720929 199903 1 007

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA BANDA ACEH

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Banda Aceh		
Tahun Penilaian	: 2025		
Periode yang dinilai	: 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar		
OPD yang Dinilai	: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan		
Sumber Data	: Renstra Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2023-2026		
Tujuan Strategis	1 Meningkatkan layanan perpustakaan		
	2 Mewujudkan penyelenggaraan kearsipan sesuai standar		
Sasaran Strategis Renstra	1 Meningkatnya layanan perpustakaan		
	2 Terwujudnya penyelenggaraan kearsipan sesuai standar		
IKU Renstra OPD	IKU		Target 2025
	1.1	Jumlah Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	31.632 Eksemplar
	1.2	Jumlah kunjungan Pemustaka ke Perpustakaan	20.597 Jiwa
	2.1	Persentase OPD yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara manual dan berbasis TIK sesuai dengan peraturan	75 Persen
	2.2	Persentase OPD yang tersedia SDM Kearsipan, sarana dan prasarana pengelolaan arsip dinamis sesuai standar	75 Persen
	2.3	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	75 Persen
	2.4	Persentase perlindungan dan penyelamatan arsip	75 Persen
Program	1. Pembinaan Perpustakaan 2. Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno 3. Pengelolaan Arsip 4. Perlindungan dan Penyelamatan Arsip		
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	TUJUAN	1.Meningkatkan layanan perpustakaan 2. Mewujudkan penyelenggaraan kearsipan sesuai standar	
	SASARAN	1.Meningkatnya layanan perpustakaan 2. Terwujudnya penyelenggaraan kearsipan sesuai standar	
	IKU	1.Persentase peningkatan pemustaka 2. Indeks penyelenggaraan kearsipan daerah	
	PROGRAM	1	Pembinaan Perpustakaan
		2	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
		3	Pengelolaan Arsip
4		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	

Banda Aceh, 02 Januari 2025
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kota Banda Aceh

Alimsyah, S.Pd., MS
Pembina Utama Muda
Nip. 19720929 199903 1 007

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA BANDA ACEH

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Banda Aceh
Tahun Penilaian	: 2025
Periode yang dinilai	: 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
OPD yang Dinilai	: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Sumber Data	: Renstra Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2023-2026
Tujuan Strategis	: 1. Meningkatkan layanan perpustakaan 2. Mewujudkan penyelenggaraan kearsipan sesuai standar
Program dan Kegiatan Utama	Program :
	1. Pembinaan Perpustakaan
	2. Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
	3. Pengelolaan Arsip
	4. Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
	Kegiatan:
	1.1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	1.2. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	2.1. Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/ Kota
	3.1. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
	3.2. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
	4.1. Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
Keluaran/Hasil Sub Kegiatan	Sub Kegiatan:
	1.1.1. Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
	1.1.2. Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota
	1.1.3. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
	1.2.1. Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	1.2.2. Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
	1.2.3. Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat

	2.1.1	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan
	3.1.1	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
	3.1.2	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
	3.2.1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN
	4.1.1	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
Program, Kegiatan, dan Keluaran/ Hasil Sub Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Program :	
	1	Pembinaan Perpustakaan
	2	Pengelolaan Arsip
	3	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
	Kegiatan:	
	1.1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	1.2	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	3.1	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
	4.1	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
	Sub Kegiatan	
	1.1.1	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
	1.1.3	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
	1.2.1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
	3.1.2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
	4.1.1	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun

Banda Aceh, 02 Januari 2025
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kota Banda Aceh



Alimsyah, S.Pd., MS
Pembina Utama Muda
Nip. 19720929 199903 1 007

IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS PEMKO KOTA BANDA ACEH

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh
 Nama OPD : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Tahun Penilaian : 2025
 Periode yang dinilai : RPD 2023-2026
 Tujuan Strategis : Mengoptimalkan reformasi birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah
 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan dan Kearsipan

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/ UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1.	Tujuan Strategis Pemda : Mengoptimalkan reformasi birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah									
	Sasaran Strategis Pemda : Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Penggunaan Gadget di Kalangan Pelajar Tingkat SD dan SMP	RSP.25.23 .25.01	PL Walikota Banda Aceh	Tidak ada batasan usia dalam penggunaan gadget dikalangan pelajar tingkat SD dan SMP	Internal	c	Tidak Terwujudnya Kota Literasi yang Berbudaya Baca	Walikota, OPD Terkait, Masyarakat
		Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Belum berjalannya penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan aturan, kurangnya pemahaman OPD tentang penataan arsip, belum tertatanya dokumen arsip di unit kearsipan sesuai dengan regulasi	RSP.25.24 .25.02	PL Walikota Banda Aceh	Belum tersedianya Tenaga Asiparis yang tersertifikasi/mumpuni	Internal	c	Tidak Terciptanya Sistem Dokumentasi Arsip Daerah yang Akurat	Walikota, OPD Terkait, Masyarakat

Banda Aceh, 02 Januari 2025
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kota Banda Aceh

Alimayah, S.Pd., MS
Pembina Utama Muda
Nip. 19728029 199903 1 007

IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS INSPEKTORAT KOTA BANDA ACEH

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh
Nama OPD : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh
Tahun Penilaian : 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Risiko			Sebab		C/U C	Dampak	
				Urutan	Kode Risiko	Pemilik	Urutan	Sumber		Urutan	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	Tujuan Strategis 1 : Meningkatkan layanan perpustakaan										
	Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya layanan perpustakaan	Persentase peningkatan pemustaka	20597 jiwa	Meningkatnya Penggunaan Gadget di Kalangan Pelajar Tingkat SD dan SMP	R50.25.23.25.01	Kepala Dinas	Tidak ada batasan usia dalam penggunaan gadget dikalangan pelajar tingkat SD dan SMP	Belum ada aturan yang mengaturnya	C	Minimnya kunjungan pemustaka ke Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
							Kendahnya peran serta orang tua terhadap anak dalam pengenalan perpustakaan	Kurangnya pengawasan dan Kepedulian orang tua	C	Minimnya kunjungan pemustaka ke Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			20597 jiwa	Kurangnya Fasilitas sarana dan prasarana untuk pelayanan perpustakaan	R50.25.23.25.02	Kepala Dinas	Perpustakaan belum menjadi skala prioritas	Kurangnya anggaran yang tersedia	C	Minimnya kunjungan pemustaka ke Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Risiko			Sebab		C/U C	Dampak	
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	Tujuan Strategis 2 : Mewujudkan penyelenggaraan kearsipan sesuai standar										
	Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya penyelenggaraan kearsipan sesuai standar	Indeks Penyelenggaraan Kearsipan Daerah	75%	Belum berjalannya penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan aturan	RSO.25.24.25.03	Kepala Dinas	belum tersedianya tenaga arsiparis yang mumpuni	belum adanya penerimaan SDM Kearsipan sesuai dengan rekomendasi ANRI dan PAN RI tentang kebutuhan tenaga Fungsional Arsiparis baik dari Formasi CPNS maupun PPPK	C	Pengelolaan kearsipan tidak berjalan (arsip kacau)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan OPD
			75%	Kurangnya pemahaman OPD tentang penataan arsip	RSO.25.24.25.04	Kepala Dinas	kurangnya kesadaran OPD tentang penataan arsip	Kurangnya kepedulian dari OPD terkait.	C	Arsip tidak tertata secara baik dan benar (arsip kacau)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan OPD
			75%	Belum tertatanya dokumen arsip di unit kearsipan sesuai dengan regulasi	RSO.25.24.25.05	Kepala Dinas	Dokumen arsip di unit kearsipan OPD belum tertata dengan baik dan benar	Kurangnya kepatuhan OPD terhadap penataan arsip dan implementasi regulasi yang telah ditetapkan	C	Arsip tidak tertata secara baik dan benar (arsip kacau)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan OPD
			75%	Kesulitan untuk melakukan temu balik arsip	RSO.25.24.25.06	Kepala Dinas	Penataan dokumen/arsip yang ada belum sesuai dengan aturan	Manajemen kearsipan belum berjalan dan sarana prasarana belum mendukung	C	Kesulitan temu balik arsip yang dibutuhkan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan OPD

Banda Aceh, 02 Januari 2025
 Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Kota Banda Aceh

Alimiyah, S.Pd., MS
 Pembina Utama Muda
 Nip. 19720029 199903 1 007

IDENTIFIKASI RESIKO OPERASIONAL INSPEKTORAT KOTA BANDA ACEH

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh
Nama OPD : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh
Tahun Penilaian : 2025

No.	Kegiatan/Bab Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Target Kinerja	Uraian Risiko				Sebab		C/UC	Dampak	
				Takap	Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
1	Pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	31632 Eksemplar	Pertanggung-jawaban	Pertanggung-jawaban tidak tepat waktu	ROO.25.2 3.25.01	Kadis Dispersip/ Kabid Perpustakaan	Dokumen Pelaksanaan tidak lengkap	internal dan Eksternal	C	Terhambatnya proses keseluruhan terkait pertanggungjawaban anggaran	Dispersip dan Masyarakat
				Perencanaan	Pengumpulan data terkendala oleh berbagai sebab	ROO.25.2 3.25.02		Kurangnya Koordinasi dengan SKPD terkait			Perencanaan tidak matang terstruktur	
				Pelaporan	Laporan tidak lengkap	ROO.25.2 3.25.03		Pelaporan tidak dilakukan secara lengkap dan terstruktur			Tidak terpenuhinya dokumen pelaporan	
				Pemantauan dan Evaluasi	Minimnya Update koleksi judul buku yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka	ROO.25.2 3.25.04		berkembangnya jumlah klasifikasi dan judul bahan bacaan, terhambatnya proses peningkatan minat baca masyarakat			Jumlah kunjungan pemustaka tidak mencapai target	
2	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan	30597 Jiwa	Pertanggung-jawaban	Pertanggung-jawaban tidak tepat waktu	ROO.25.2 3.25.05	Kadis Dispersip/ Kabid Perpustakaan	Jumlah dana untuk melengkapi sarana dan prasarana perpustakaan sangat terbatas	internal dan Eksternal	C	Terhambatnya proses keseluruhan terkait pertanggungjawaban anggaran	Dispersip dan Masyarakat

Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Target Kinerja	Uraian Risiko				Sebab		C/UC	Dampak	
				Tahap	Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
	Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Perencanaan	Pengumpulan data terkendala oleh berbagai sebab	ROO.25.2 3.25.06		Kurangnya Koordinasi dengan SKPD terkait			Perencanaan tidak matang terstruktur	
				Pelaporan	Laporan tidak lengkap	ROO.25.2 3.25.07		Pelaporan tidak dilakukan secara lengkap dan terstruktur			Tidak terpenuhinya target laporan informasi yang didiseminasikan	
				Pemantauan dan Evaluasi	Terhentinya layanan Informasi Perpustakaan	ROO.25.2 3.25.08		minimnya Kepedulian Pemerintah terhadap pengembangan perpustakaan			anggaran tidak diterapkan maksimal	
3	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokasi Pembudayaan Kegetrahan Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	20597 Jiwa	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.25.2 3.25.09	Kadis Dispersip/ Kabid Perpustakaan	Dokumen Pelaksanaan tidak lengkap	Eksternal	C	Terhambatnya proses keseluruhan terkait pertanggungjawaban anggaran	Dispersip, Sarana Pendidikan dan Masyarakat
				Perencanaan	Pengumpulan data terkendala oleh berbagai sebab	ROO.25.2 3.25.10		Kurangnya Koordinasi dengan Sekolah dasar dan Masyarakat terkait Sosialisasi Budaya literasi			Perencanaan tidak matang terstruktur	
				Pelaporan	Laporan tidak lengkap	ROO.25.2 3.25.11		Pelaporan tidak dilakukan secara lengkap dan terstruktur			Tidak terpenuhinya dokumen pelaporan	
				Pemantauan dan Evaluasi	Kurangnya tenaga SDM di dalam proses Sosialisasi	ROO.25.2 3.25.12		Evaluasi hanya dilakukan terbatas pada kuantitas lokasi sosialisasi			Target lokasi yang dipilih sebagai tempat sosialisasi tidak sesuai dengan sasaran	
4	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan-	75%	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.25.2 4.25.13	Kadis Dispersip/K. abid Kearsipan	Dokumen Pelaksanaan tidak lengkap	Internal dan Eksternal	C	Terhambatnya proses keseluruhan terkait pertanggungjawaban anggaran	Dispersip, OPD

Revisi Tindak Pengendalian (RTP)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Target Kinerja	Urutan Risiko				Sebab		C/ UC	Dampak	
				Tahap	Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
	Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun		Perencanaan	Pengumpulan data terkendala oleh berbagai sebab	ROO.25.2 4.25.14		Kurangnya Koordinasi dengan SKPD terkait dengan layanan jaringan intra yang diberikan			Perencanaan tidak matang dan terstruktur	
				Pelaporan	Laporan tidak lengkap	ROO.25.2 4.25.15		Pelaporan tidak dilakukan secara lengkap dan terstruktur			Tidak terpenuhinya target layanan jaringan intra yang diberikan	
				Pemantauan dan Evaluasi	Terminasinya alat bukti yang seharusnya tidak boleh dimusnahkan dan tidak ada penggantian.	ROO.25.2 4.25.16		Kurangnya sarana dan prasarana OPD dan stakeholder terkait lainnya perihal pelaksanaan pemusnahan arsip			Kondisi sarana dan Prasarana TIK yang dimiliki OPD tidak sesuai dengan standar yang direncanakan/ ditetapkan	

Banda Aceh, 02 Januari 2025
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kota Banda Aceh


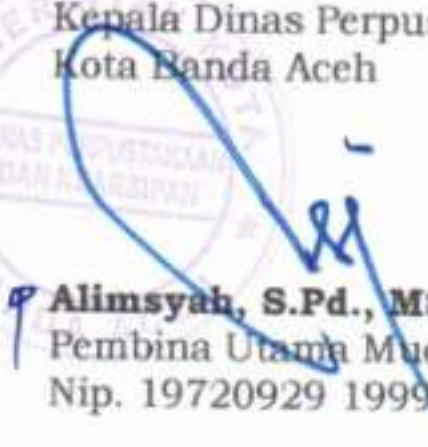
Alimsyah, S.Pd., MS
Pembina Utama Muda
Nip. 19720929 199903 1 007

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh
Tahun Penilaian : 2025
Tujuan Strategis : Mengoptimalkan reformasi birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan dan Kearsipan

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
A	B	C	D	E	F
I	Risiko Strategis				
1	Meningkatnya Penggunaan Gadget di Kalangan Pelajar Tingkat SD dan SMP	RSP.25.23.25.01	3	3	14
2	Belum berjalannya penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan aturan, kurangnya pemahaman OPD tentang penataan arsip, belum tertatanya dokumen arsip di unit kearsipan sesuai dengan regulasi	RSP.25.24.25.02	3	3	14
II	Risiko Strategis OPD				
1	Meningkatnya Penggunaan Gadget di Kalangan Pelajar Tingkat SD dan SMP	RS0.25.23.25.01	2	3	10
2	Kurangnya Fasilitas sarana dan prasarana untuk pelayanan perpustakaan	RS0.25.23.25.02	4	2	13
3	belum berjalannya penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan aturan	RS0.25.24.25.03	2	3	10
4	kurangnya pemahaman OPD tentang penataan arsip	RS0.25.24.25.04	2	3	10
5	belum tertatanya dokumen arsip di unit kearsipan sesuai dengan regulasi	RS0.25.24.25.05	2	3	10
6	kesulitan untuk melakukan temu balik arsip	RS0.25.24.25.06	2	3	10
III	Risiko Operasional OPD				
1	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.25.23.25.01	2	2	7

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
A	B	C	D	E	F
2	Pengumpulan data terkendala oleh berbagai sebab	ROO.25.23.25.02	2	3	10
3	Laporan tidak lengkap	ROO.25.23.25.03	2	2	7
4	Minimnya Update koleksi judul buku yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka	ROO.25.23.25.04	3	2	11
5	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.25.23.25.05	3	2	11
6	Pengumpulan data terkendala oleh berbagai sebab	ROO.25.23.25.06	2	3	10
7	Laporan tidak lengkap	ROO.25.23.25.07	2	2	7
8	Terhentinya layanan Informasi Perpustakaan	ROO.25.23.25.08	2	2	7
9	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.25.23.25.09	2	2	7
10	Pengumpulan data terkendala oleh berbagai sebab	ROO.25.23.25.10	2	3	10
11	Laporan tidak lengkap	ROO.25.23.25.11	2	2	7
12	Kurangnya tenaga SDM di dalam proses Sosialisasi	ROO.25.23.25.12	3	3	14
13	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.25.24.25.13	2	2	7
14	Pengumpulan data terkendala oleh berbagai sebab	ROO.25.24.25.14	2	3	10
15	Laporan tidak lengkap	ROO.25.24.25.15	2	2	7
16	Termusnahkannya alat bukti yang seharusnya tidak boleh dimusnahkan dan tidak ada penggantinya.	ROO.25.24.25.16	2	3	10

Banda Aceh, 02 Januari 2025
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kota Banda Aceh



Alimsyah, S.Pd., MS
Pembina Utama Muda
Nip. 19720929 199903 1 007

DAFTAR RESIKO PRIORITAS

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh
Tahun Penilaian : 2025
Tujuan Strategis : Mengoptimalkan reformasi birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan dan Kearsipan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I	Risiko Strategis Pemko					
1	Meningkatnya Penggunaan Gadget di Kalangan Pelajar Tingkat SD dan SMP	RSP.25.23.25.01	14	Pj Walikota	Tidak ada batasan usia dalam penggunaan gadget dikalangan pelajar tingkat SD dan SMP	Tidak Terwujudnya Kota Literasi yang Berbudaya Baca
2	Belum berjalannya penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan aturan, kurangnya pemahaman OPD tentang penataan arsip, belum tertatanya dokumen arsip di unit kearsipan sesuai dengan regulasi	RSP.25.24.25.02	14	Pj Walikota	Belum tersedianya Tenaga Asiparis yang tersertifikasi/ mumpuni	Tidak Terciptanya Sistem Dokumentasi Arsip Daerah yang Akurat
II	Risiko Strategi OPD					
1	Meningkatnya Penggunaan Gadget di Kalangan Pelajar Tingkat SD dan SMP	RSO.25.23.25.01	10	Kepala Dinas	Tidak ada batasan usia dalam penggunaan gadget dikalangan pelajar tingkat SD dan SMP	Minimnya kunjungan pemustaka ke Perpustakaan
2	Belum berjalannya penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan aturan	RSO.25.24.25.03	10	Kepala Dinas	kurangnya kesadaran OPD tentang penataan arsip	Arsip tidak tertata secara baik dan benar (arsip kacau)
III	Risiko Operasional OPD					

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
1	Minimnya Update koleksi judul buku yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka	ROO.25.23.25.04	11	Kepala Dinas	berkembangnya jumlah klasifikasi dan judul bahan bacaan, terhambatnya proses peningkatan minat baca masyarakat	Jumlah kunjungan pemustaka tidak mencapai target
2	Terhentinya layanan Informasi Perpustakaan	ROO.25.23.25.08	7	Kepala Dinas	minimnya Kepedulian Pemerintah terhadap pengembangan perpustakaan	anggaran tidak terserap dengan maksimal
3	Kurangnya tenaga SDM di dalam proses Sosialisasi	ROO.25.23.25.12	14	Kepala Dinas	Evaluasi hanya dilakukan terbatas pada kuantitas lokasi sosialisasi	Target lokasi yang dipilih sebagai tempat sosialisasi tidak sesuai dengan sasaran
4	Termusnahkannya alat bukti yang seharusnya tidak boleh dimusnahkan dan tidak ada penggantinya.	ROO.25.24.25.16	10	Kepala Dinas	Kurangnya sarana dan prasarana OPD dan stakeholder terkait lainnya perihal pelaksanaan pemusnahan arsip	Kondisi sarana dan Prasarana TIK yang dimiliki OPD tidak sesuai dengan standar yang direncanakan / ditetapkan

Banda Aceh, 02 Januari 2023

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kota Banda Aceh

Alimsyah, S.Pd., MS

Pembina Utama Muda

Nip. 19720929 199903 1 007

**PENILAIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG ADA DAN MASIH DIBUTUHKAN
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)**

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh
Tahun Penilaian : 2025
Tujuan Strategis : Mengoptimalkan reformasi birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan dan Kearsipan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Risiko Strategis Pemko						
1	Meningkatnya Penggunaan Gadget di Kalangan Pelajar Tingkat SD dan SMP	RSP.25.23.25.01	Melaksanakan sosialisasi minat dan budaya baca pada kalangan pelajar	bentuk kegiatan sosialisasi belum optimal	Meningkatkan dan melahirkan bentuk sosialisasi secara langsung dan menyeluruh dengan menggunakan fasilitas Teknologi Informasi	Kepala Dispersip dan Masyarakat	Triwulan I s/d IV
2	Belum berjalannya penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan aturan, kurangnya pemahaman OPD tentang penataan arsip, belum tertatanya dokumen arsip di unit kearsipan sesuai dengan regulasi	RSP.25.24.25.02	Mengusulkan kepada pihak terkait untuk pengadaan perangkat pendukung sistem penyimpanan data	tidak berjalannya pendanaan dokumen arsip secara sistematis	Pengadaan perangkat sistem penyimpanan data	Kepala Dispersip	Triwulan I s/d IV

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
A	B	C	D	E	F	G	H
II	Risiko Strategis OPD						
1	Meningkatnya Penggunaan Gadget di Kalangan Pelajar Tingkat SD dan SMP	RS0.25.23.25.01	Melaksanakan sosialisasi minat dan budaya baca pada kalangan pelajar, melibatkan peran orang tua terhadap dampak dari penggunaan Gadget	bentuk kegiatan sosialisasi belum optimal	Meningkatkan dan melahirkan bentuk sosialisasi secara langsung dan menyeluruh dengan menggunakan fasilitas Teknologi Informasi	Kepala Dispersip	Triwulan II s/d III
2	Belum berjalannya penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan aturan	RS0.25.24.25.03	Usulan Regulasi terkait Kearsipan	belum adanya draft regulasi kearsipan	Menyusun draft regulasi kearsipan	Kepala Dispersip	Triwulan I s/d III
III	Risiko Operasional OPD						
1	Minimnya Update koleksi judul buku yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka	ROO.25.23.25.04	Mengusulkan kepada pihak terkait untuk pengadaan bahan pustaka baru	tidak berjalannya pendanaan secara baik	Pengadaan bahan pustaka baru	Kabid Perpustakaan	Triwulan III s/d IV
2	Terhentinya layanan Informasi Perpustakaan	ROO.25.23.25.08	Menerapkan sistem informasi Perpustakaan yang berbasis otomasi	belum Optimal kemampuan teknis SDM dalam bidang teknologi informasi	Mengusulkan anggaran pelatihan	Kabid Perpustakaan	Triwulan I s/d IV
3	Kurangnya tenaga SDM di dalam proses Sosialisasi	ROO.25.23.25.12	Mengusulkan penambahan SDM	Kompetensi tenaga SDM tidak sesuai	Mengoptimalkan kemampuan SDM	Kabid Perpustakaan	Triwulan I s/d IV

Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *j	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
A	B	C	D	E	F	G	H
4	Termusnahkannya alat bukti yang seharusnya tidak boleh dimusnahkan dan tidak ada penggantinya.	ROO.25.24.25.16	Pengasulan pengadaan perangkat	Lambatnya penentuan sistem dan jenis perangkat disektoral OPD	Pengadaan perangkat pendukung layanan kearsipan	kabid Kearsipan	Triwulan III s/d IV

Banda Aceh, 02 Januari 2025
 Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Kota Banda Aceh


Alimsyah, S.Pd., MS
 Pembina Utama Muda
 Nip. 19720929 199903 1 007

RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh
Tahun Penilaian : 2025
Tujuan Strategis : Mengoptimalkan reformasi birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan dan Kearsipan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Risiko Strategis Pemko						
1	Melaksanakan sosialisasi minat dan budaya baca pada kalangan pelajar	Surat edaran Kepala Dinas, Kerjasama, dan evaluasi kegiatan	Sekda	OPD	Triwulan I s/d IV	Januari - Desember 2025	
2	Mengusulkan kepada pihak terkait untuk pengadaan perangkat pendukung sistem penyimpanan data	Surat Edaran, Rapat	Sekda	OPD	Triwulan I s/d IV	Januari - Desember 2025	
II	Risiko Strategis OPD						
1	Melaksanakan sosialisasi minat dan budaya baca pada kalangan pelajar, melibatkan peran orang tua terhadap dampak dari penggunaan Gadget	Surat edaran Kepala Dinas, Kerjasama, dan evaluasi kegiatan	Dispersip dan Masyarakat	Perpusnas, Pemerintah Aceh, Walikota, OPD Terkait, Masyarakat, Komunitas	Triwulan II s/d III	Januari - Agustus 2025	Telah Dilakukan sesuai dengan Rencana awal tahun yang dibuat
2	Usulan Regulasi terkait Kearsipan	SK Penyusunan Draf Regulasi, Draf Regulasi, Rapat dan evaluasi	Dispersip dan Masyarakat	ANRI, Pemerintah Aceh, Walikota, OPD Terkait, Masyarakat, Komunitas	Triwulan I s/d III	Januari - Agustus 2025	Telah Dilakukan sesuai dengan Rencana awal tahun yang dibuat

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
III	Risiko Operasional OPD						
1	Mengusulkan kepada pihak terkait untuk pengadaan bahan pustaka baru	Usulan RKBMD Ke bagian aset, mengidentifikasi bahan pustaka, dan evaluasi	Dispersip	Perpusnas, Pemerintah Aceh, Walikota, OPD Terkait	Triwulan III s/d IV	Juli - Desember 2025	Telah Dilakukan sesuai dengan Rencana awal tahun yang dibuat
2	Menerapkan sistem informasi Perpustakaan yang berbasis otomasi	Implementasikan Automasi Perpustakaan dengan Penggunaan Aplikasi INLISLITE Versi 3.1 dan evaluasi	Dispersip	OPD Terkait	Triwulan I s/d IV	Januari - Desember 2025	Telah Dilakukan sesuai dengan Rencana awal tahun yang dibuat
3	Mengusulkan penambahan SDM	Surat Kepala Dinas, arjab ABK dan Evaluasi	Dispersip dan OPD	Walikota, OPD Terkait	Triwulan I s/d IV	Januari - Desember 2025	Telah Dilakukan sesuai dengan Rencana awal tahun yang dibuat
4	Pengusulan pengadaan perangkat	Usulan RKBMD ke bagian Aset,	Dispersip dan OPD	ANRI ,Pemerintah Aceh, Walikota, OPD Terkait,	Triwulan III s/d IV	Juli - Desember 2025	Telah Dilakukan sesuai dengan Rencana awal tahun yang dibuat

Banda Aceh, 02 Januari 2025
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kota Banda Aceh



Alimsyah, S.Pd., MS
Pembina Utama Muda
Nip. 19720929 199903 1 007

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh
Tahun Penilaian : 2025
Tujuan Strategis : Mengoptimalkan reformasi birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan dan Kearsipan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
I	Risiko Strategis Pemko					
1	Melaksanakan sosialisasi minat dan budaya baca pada kalangan pelajar	Laporan monitoring tindak lanjut hasil sosialisasi	Pj. Walikota	Triwulan I sd IV	Januari - Desember 2025	
2	Mengusulkan kepada pihak terkait untuk pengadaan perangkat pendukung sistem penyimpanan data	Laporan monitoring tindak lanjut hasil pengadaan perangkat pendukung sistem penyimpanan data	Pj. Walikota	Triwulan I sd IV	Januari - Desember 2025	
II	Risiko Strategis OPD					
1	melaksanakan sosialisasi minat dan budaya baca pada kalangan pelajar, melibatkan peran orang tua terhadap dampak dari penggunaan Gadget	Konfirmasi persiapan dan laporan Pelaksanaan Kegiatan	kepala Dispersip	Triwulan II s/d III	Januari - Agustus 2025	
2	Usulan Regulasi terkait Kearsipan	Konfirmasi persiapan dan laporan Pelaksanaan Kegiatan	kepala Dispersip	Triwulan I s/d III	Januari - Agustus 2025	

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
III	Risiko Operasional OPD					
1	Mengusulkan kepada pihak terkait untuk pengadaan bahan pustaka baru	Konfirmasi persiapan dan laporan Pelaksanaan Kegiatan	kepala Dispersip	Triwulan III s/d IV	Juli - Desember 2025	
2	Menerapkan sistem informasi Perpustakaan yang berbasis otomasi	Konfirmasi persiapan dan laporan Pelaksanaan Kegiatan	kepala Dispersip	Triwulan I s/d IV	Januari - Desember 2025	
3	Mengusulkan penambahan SDM	Konfirmasi persiapan dan laporan Pelaksanaan Kegiatan	kepala Dispersip	Triwulan I s/d IV	Januari - Desember 2025	
4	Pengusulan pengadaan perangkat	Konfirmasi persiapan dan laporan Pelaksanaan Kegiatan	kepala Dispersip	Triwulan III s/d IV	Juli - Desember 2025	

Banda Aceh, 02 Januari 2025
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kota Banda Aceh

Alimsyah, S.Pd., MS
Pembina Utama Muda
Nip. 19720929 199903 1 007

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN PELAKSANAAN RTP

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh
 Tahun Penilaian : 2025
 Tujuan Strategis : Mengoptimalkan reformasi birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah
 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan dan Kearsipan

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
I Risiko Strategis Pemda										
1	Meningkatnya Penggunaan Gadget di Kalangan Pelajar Tingkat SD dan SMP	RSP.24.23.25.01		Tidak ada batasan usia dalam penggunaan gadget dikalangan pelajar tingkat SD dan SMP	Tidak Terwujudnya Kota Literasi yang Berbudaya Baca		Meningkatkan dan melahirkan bentuk sosialisasi secara langsung dan menyeluruh dengan menggunakan fasilitas Teknologi Informasi	Triwulan I a/d IV	Januari s/d Desember 2025	
2	Belum berjalannya penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan aturan, kurangnya pemahaman OPD tentang penanganan arsip, belum teraturnya dokumen arsip di unit kearsipan sesuai dengan regulasi	RSP.24.24.25.02		Belum tersedianya Tenaga Aarsiparis yang teridentifikasi/ maupun	Tidak Terciptanya Sistem Dokumentasi Arsip Daerah yang akurat		Pengadaan perangkat sistem penyusutan data	Triwulan I a/d IV	Januari s/d Desember 2025	
II Risiko Strategis OPD										
1	Meningkatnya Penggunaan Gadget di Kalangan Pelajar Tingkat SD dan SMP	RSP.25.23.26.01		Tidak ada batasan usia dalam penggunaan gadget dikalangan pelajar tingkat SD dan SMP	Minimnya kunjungan pemustaka ke Perpustakaan		Meningkatkan dan melahirkan bentuk sosialisasi secara langsung dan menyeluruh dengan menggunakan fasilitas Teknologi Informasi	Triwulan II a/d III	Januari - Agustus 2025	

Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
2	Belum berjalannya penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan aturan	RSD.25.24.25.03		Belum terdapatnya Tenaga Akriparia yang terakreditasi/ mumpuni	Arsip tidak tertata secara baik dan benar (arsip kaca)		Menyusun draft regulasi kearsipan	Triwulan I s/d III	Januari - Agustus 2025	
III Risiko Operasional OPD										
1	Minimnya Update koleksi judul buku yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka	ROO.25.23.25.04		berkembangnya jumlah klasifikasi dan judul bahan bacaan, terhambatnya proses peningkatan minat baca masyarakat	berkembangnya jumlah klasifikasi dan judul bahan bacaan, terhambatnya proses peningkatan minat baca masyarakat		Pengadaan bahan pustaka baru	Triwulan III s/d IV	Juli - Desember 2025	
2	Tertentunya layanan Informasi Perpustakaan	ROO.25.23.25.08		minimnya Kepedulian Pemerintah terhadap pengembangan perpustakaan	minimnya Kepedulian Pemerintah terhadap pengembangan perpustakaan		Mengusulkan anggaran pelatihan	Triwulan I s/d IV	Januari - Desember 2025	
3	Kurangnya tenaga SDM di dalam proses Sosialisasi	ROO.25.23.25.12		Evaluasi hanya dilakukan terbatas pada kuantitas lokasi sosialisasi	Evaluasi hanya dilakukan terbatas pada kuantitas lokasi sosialisasi		Mengoptimalkan kemampuan SDM	Triwulan I s/d IV	Januari - Desember 2025	
4	Terwujudkannya slot buku yang seharusnya tidak boleh dimusnahkan dan tidak ada penggantian	ROO.25.24.25.16		Kurangnya sarana dan prasarana OPD dan stakeholder terkait lainnya perihal pelaksanaan pemusnahan arsip	Kurangnya sarana dan prasarana OPD dan stakeholder terkait lainnya perihal pelaksanaan pemusnahan arsip		Pengadaan pengadaan perangkat pendukung layanan kearsipan	Triwulan III s/d IV	Juli - Desember 2025	

Banda Aceh, 02 Januari 2025

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Kota Banda Aceh

Alimsyah, S.Pd., MS

Pembina Utama Muda

Nip. 19720929 199903 1 007

NOTULEN RAPAT

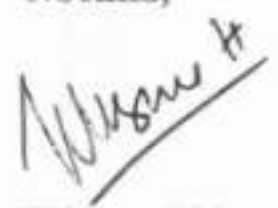
Rapat : Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Dispersip Tahun 2025
Hari / Tanggal : Kamis / 02 Januari 2025
Tempat Ruang : Rapat Kepala Dispersip
Pukul : 08.30 WIB s.d Selesai
Pimpinan Rapat : Kepala Dispersip
Peserta Rapat : Pejabat Struktural dan Tim Penyusun RTP Dispersip

Hasil Keputusan Rapat:

- Dispersip Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dispersip Banda Aceh
- Dispersip terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Perpustakaan, Bidang Kearsipan, Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset, Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dan Staf
- Berdasarkan Undang-Undang (UU) nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta untuk menciptakan Good Governance melalui UU nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan UU nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara maka diperlukan suatu kebijakan yang berkaitan dengan pengendalian oleh pemerintah melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (**SPIP**)
- Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan yang berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP
- Pemerintah Kota Banda Aceh wajib menyelenggarakan kebijakan SPIP sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 yang diperkuat dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh secara terintegrasi ke dalam kegiatan dan tindakan pelaksanaan tugas pokok di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh dan diperkuat dengan Perwal Banda Aceh Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Resiko pada OPD di lingkungan Pemkot Banda Aceh Dispersip wajib menyusun dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun 2025 Dokumen RTP ditujukan sebagai rencana tindak (action plan) penguatan dan penerapan SPIP baik dalam bentuk pembangunan lingkungan pengendalian risiko maupun infrastruktur kebijakan pengendalian risiko serta sebagai panduan di dalam mencegah serta mitigasi risiko yang akan muncul di dalam pelaksanaan tupoksi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dispersip Kota Banda Aceh
- Penyusunan RTP Dispersip wajib mengikutsertakan seluruh ASN di Dispersip dikarenakan di dalam penyusunan risiko dan mitigasinya Bidang-bidang di dalam Dispersip lebih mengetahui secara pasti dan detail apa saja risiko dan bagaimana mitigasi risiko yang harus dilakukan
- Tim Penyusun RTP Dispersip sudah dibentuk dengan penetapan SK Kadis Dispersip Nomor 664 Tahun 2024 dan memiliki tugas di dalam menyusun seluruh dokumen yang diwajibkan untuk diisi berdasarkan asistensi dan bimtek dengan Inspektorat Kota Banda Aceh dan BPKP Provinsi Aceh yang telah dilakukan dari tanggal 18-23 Desember 2024

- Tim penyusun RTP melakukan pengisian kuesioner yang dibutuhkan dengan didampingi oleh Asesor RTP yang telah mengikuti bimtek tersebut di atas secara pendampingan langsung sehingga penyusunan RTP tidak memerlukan lagi bentuk kuesioner secara fisik karena kuesioner langsung diisi langsung dengan pendampingan asesor RTP
- RTP Diskominfotik diharapkan dapat selesai dalam waktu yang ditentukan yaitu pada tanggal 7 Januari sehingga dapat diserahkan kepada Inspektorat dan verifikator yang telah ditunjuk sehingga apabila terdapat perbaikan dapat ditindaklanjuti dengan segera

Notulis,



Wisnu Hidayat, SE

FOTO KEGIATAN RAPAT





PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jln. Tgk. Dianjong, No. 12, Gampong Keudah, Kutaraja (0651) 636792
Email : dispersip@bandaacehkota.go.id Website : dispersip.bandaacehkota.go.id

ABSEN HADIR RAPAT DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BANDA ACEH

Hari/Tanggal/Pukul : Kamis / 02 Januari 2025 / 08.30 WIB s/d Selesai
Acara : Rapat Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Dispersip Tahun 2025
Tempat : Kantor Perpustakaan dan Kearsipan, Keudah
Pimpinan Rapat : Kepala Dispersip
Peserta Rapat : Pejabat Struktural dan Tim Penyusunan RTP Tahun 2025 Dispersip

NO	NAMA / NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Alimsyah, S.Pd, MS	Kepala Dinas	1.
2	Mulizar, S.Pd, M. Pd	Sekretaris	2.
3	Nurjannah, SKM, M.K.M	Kabid Kearsipan	3.
4	Eddy Safari, S.Pd	Kabid Perpustakaan	4.
5	Khairiati, S.Hum	Perencana Ahli Muda	5.
6	Musnahayati, S.Pd.I	Pustakawan Ahli Muda	6.
7	Maisyura, A.Md	Arsiparis Ahli Muda	7.
8	Mustafa Kamal, S.Sos	Arsiparis Ahli Pertama	8.
9	Effikayana, SP	Kasubbag Umum Kepegawaian dan Aset	9.
10	Laila Ratna Dewi	Bendahara	10.
11	Wisnu Hidayat, SE	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	11.
12	Fitriani, SE	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	12.
13	Khuzaimah, S.Kom	Staf Pelaksana	13.
14			14.
15			15.
16			16.
17			17.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kota Banda Aceh
Alimsyah, S.Pd, MS
Pembina Utama Muda
Nip. 19720929 199003 1 007